

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- , *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008.
- Abdul Aziz Hakim, *Distorsi Sistem Pemerintahan (Impeachment) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung*, Toga Press (UMMU Press), 2006.
- Aca Sugandhy, *Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan sebagai Alat Keterpaduan Pembangunan*, Makalah Pada Konferensi PSL VII 1987 di Sulawesi Selatan, 1987.
- Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017
- Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, Universitas Parahyangan, Bandung, 1997.
- Aminuddin Ilmar, *Memaknai Kepemerintahan yang Baik Melalui Penerapan Prinsip Tata Kelola dan Keabsahan Tindakan Pemerintah*, Phinatama Media, 2020.
- Atang Ranuwiharja, R, *Hukum Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Transito, Bandung, 1989.
- Ateng Syarifudin, *Pengurusan Perizinan*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan ST Alosius, Bandung, 1992.
- , *Perizinan untuk Kegiatan Perizinan*, Majalah *Hukum*. Media Komunikasi FH Unpas, Edisi 23 Tahun 1997, hlm.5.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2007.
- Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta, cet. II, 1989.

- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Cetakan ke-III, Nuansa, 2016.
- , *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, hal.117.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Jimly Asshiddiqie. 2018. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cetakan Ke-11. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Lily Rasydi dan I.B Wijaya Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993.
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta, 2008.
- M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- , *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Mochtar Koesoemaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara hukum*, Yoyakarta :Pustaka Pelajar, 2005.
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokratis (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon et,al *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2008.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Admistrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, 1981.

- Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung. Mandar Maju, Jakarta.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH UNAIR, Surabaya, Surabaya, 1993.
- , *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Winahyu Erwiningsih, *Hak Pengelolaan atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Yunus Wahid A.M, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Yunus Wahid A.M, 2010, *Paradigma dan Instrumen Yuridis dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, Orasi Ilmiah (Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Hukum Lingkungan dan Hukum Tata Ruang pada Fakultas Hukum Unhas, tanggal 2 Agustus 2010 di Makassar.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Internet

Picu Kemacetan di Pengayoman, DPRD Makassar Ancam Cabut Izin Toko Alaska (terkini.id)

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, 2020, *Salinan Salinan Data Penduduk Tahun 2020 (Semester 1)*, Sumber: <https://dukcapil.makassar.go.id/data-penduduk/#1611702020289-06982daf-d919>, Diakses Tanggal 21 November 2021, Pukul 14.42 WITA

IQAir, 2021, *Kualitas Udara di Dekat Makassar Sulawesi Selatan*, Sumber: <https://www.iqair.com/id/indonesia/south-sulawesi/makassar>, Diakses Tanggal 21 November 2021, Pukul 15.17 WITA.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, format HTML, sumber URL: <http://kamusbahasaindonesia.org/lembaga>

Rpkpp Kota Makassar. 2014. *Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas*. Di akses dari: https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen_usulan/rpkpp/0935_RPKPP-7301_747d9b.pdf

Pemerintah RTRW Kota Makassar. 2019. *Makassar City RTRW Strategic Area Plan Map for 2015-2034*. Di akses dari: <https://integrasidata.id/data/peta-rencana-kawasan-strategis-rtrw-kota-makassar-tahun-2015-2034/>

Anugrah Mappagala. 2019. *Tata Ruang Kota Makassar dan Permasalahannya*. Di akses dari:

<https://www.quareta.com/post/tata-ruang-kota-makassar-permasalahannya>

Jurnal

Tim Peneliti FH UNPAD, dalam seminar tentang Perizinan Pembangunan Tanah Pantai, Bandung, 1993, hlm. 8-10.

Andi Sitti Saidah Nurfaradiba. 2018. *Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan*

Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016. Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Kurniawan Akbar. 2017. *Implementasi Kebijakan Tata Ruang Tentang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu Di Kota Makassar*. Jurnal. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Muh. Hasrul. 2021. Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh Kepala Daerah Terpilih Dari Jalur Perseorangan Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13*.

Zulkifli Aspan. 2019. *Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara*. *Jurnal Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 1 No. 1.

Tesis

Erwin Amri. 2013. *Implementasi Pemanfaatan Ruang terhadap Perkembangan Rumah Toko dan Rumah Kantor di Kota Makassar*. Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Fatmasari. 2013. *Pemanfaatan Tanah untuk Kawasan Permukiman Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar*. Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA

KAMPUS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 587219, 584686, FAX. (0411) 587219, 590846 MAKASSAR 90245 E-mail : fh-uh@indosat.net.id

Nomor : 8008/UN4.5.1/PT.01.04/2021
Lamp. : Proposal Penelitian
Hal. : Permohonan Izin Penelitian

16 September 2021

Kepada
Yth. : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. SulSel Cq. Bidang Penyelenggaraan & Pelayanan Perizinan
Di -
Tempat

Dengan hormat, kami mohon kebijaksanaan Saudara kiranya berkenan memberi izin dan bantuan untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : Dicky Prayogo
Nomor Pokok : B012191064
Program Studi : Magister Ilmu Hukum (S2)
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Penegakan Hukum Pemanfaatan Tata Ruang Terhadap Kawasan Pemukiman di Kecamatan Panakkukang Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Pembimbing : Dr. Zulkifli Aspan, SH., MH. (Ketua)
Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. (Anggota)

Atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum FH-UH,
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 21380/S.01/PTSP/2021
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
1. Walikota Makassar
2. Ketua DPRD Kota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum PPs UNHAS Makassar Nomor : 8008/UN4.5.1/PT.01.04/2021 tanggal 16 September 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **DICKY PRAYOGO**
Nomor Pokok : B012191064
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :

" PENEKAKAN HUKUM PEMANFAATAN TATA RUANG TERHADAP KAWASAN PEMUKIMAN DI KECAMATAN PANAKKUKANG MENURUT RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 September s/d 20 Oktober 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 20 September 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Hukum PPs UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAKASSAR**

Jl. Andi Pangerang Pettarani Blok E. No. 1-2 Telp. 868296 - 868909 - 880863 Fax. 882455 Makassar 90222
E-mail : dprd_@makassar.go.id Homepage : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 23 September 2021

K e p a d a

Nomor : 070/1006/Set.DPRD/IX/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

YTH. **Kepala Dinas PTSP Prov. Sul-Sel**
Cq. **Dekan PPs Fak. Hukum UNHAS**
di-

M a k a s s a r

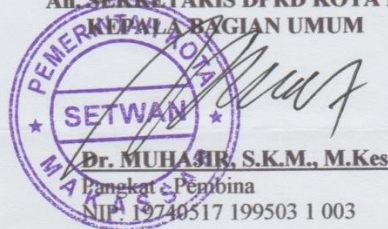
Dengan hormat disampaikan bahwa menunjuk surat Saudara, Nomor : 21380/S.01/PTSP/2021, tanggal 20 September 2021, Perihal Permohonan Izin Penelitian di Sekretariat DPRD Kota Makassar, maka pada prinsipnya kami berkenan menerima Mahasiswa/i tersebut dibawah ini:

Nama : **DICKY PRAYOGO**
Nomor Induk : B012191064
Prog. Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)
Judul : **"Penegakan Hukum Pemanfaatan Tata Ruang Terhadap Kawasan Pemukiman Kecamatan Panakkukang Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota"**

Untuk melaksanakan Izin Penelitian di kantor sekretariat DPRD Kota Makassar dengan ketentuan dapat mentaati segala peraturan yang berlaku di Sekretariat DPRD Kota Makassar.

Demikian di sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. SEKRETARIS DPRD KOTA MAKASSAR
KOPAL BAGIAN UMUM



Tembusan :

5. Ketua DPRD Kota Makassar (sebagai Laporan)
5. Ketua Komisi DPRD Kota Makassar (Yang Terkait)
7. Kepala Bagian Persidangan Sek. DPRD Kota Makassar
8. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 23 September 2021

K e p a d a

Yth. Terlampir

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/3060-II/BKBP/IX/2021

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Memperhatikan : Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor **21380/S.01/PTSP/2021**, Tanggal 20 September 2021 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Makassar menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

- Nama : **DICKY PRAYOGO**
NIM / Jurusan : B012191064 / Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) UNHAS
Tanggal pelaksanaan: **23 September s/d 20 Oktober 2021**
Jenis Penelitian : Tesis
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar
Judul : **“PENEGAKAN HUKUM PEMANFAATAN TATA RUANG TERHADAP KAWASAN PEMUKIMAN DI KECAMATAN PANAKKUKANG MENURUT RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA ”**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL.

u.b.

SEKERTARIS,



DR. HARI, S.IP., S.H., M.H., M.Si

Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b

NIP : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (*sebagai laporan*);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar (*sebagai laporan*);
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (*sebagai laporan*);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Dekan Fak. Hukum PPs UNHAS Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111
Tlp. +62411 - 3616006, Fax. +62411 - 3634947

Email: sekda@makassarkota.go.id Home Page: <http://www.makassarkota.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 180 / B.Huk / 674 / IX / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **A. ARIANTO, SH., MH**
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Setda Kota Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **DICKY PRAYOGO**
Nim/Jurusan : B012191064 / Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) UNHAS
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar
Judul : **"PENEGAKAN HUKUM PEMANFAATAN TATA RUANG
TERHADAP KAWASAN PEMUKIMAN DI KECAMATAN
PANAKKUKANG MENURUT RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA MAKASSAR"**

Benar telah mengadakan penelitian dalam bentuk pengambilan data dan wawancara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar mulai dari tanggal 23 September 2021 s/d 13 Oktober 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 13 Oktober 2021

A.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
Kasubag Bantuan Hukum,



A. ARIANTO, SH., MH

Pangkat : Penata TK I / III.d

NIP : 19750117 200901 1 006



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENATAAN RUANG

Jl. Urip Sumoharjo No. 8, Makassar 90144

☎ (0411) 435-550 Fax : (0411)436-567 ✉ distaru.mks@gmail.com



SURAT KETERANGAN

NOMOR: 049/548/distaru/x/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Ir. H. MUH. FUAD AZIS D.M., S.T., M.Si**
NIP : 19691019 200701 1 018
Pangkat / Golongan : Pembina / IV.a
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENATAAN RUANG

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **DICKY PRATYOGO**
Nim/ Jurusan : B012191064 / Ilmu Hukum
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa (S2) / UNHAS
Judul : " PENEKAKAN HUKUM PEMANFAATAN TATA RUANG
TERHADAP KAWASAN PEMUKIMAN DI KECAMATAN
PANAKKUKANG MENURUT RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA " .

Telah melakukan penelitian pada Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar terhitung mulai tanggal 01 s/d 02 Oktober 2021

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 08 Oktober 2021

an Kepala Dinas
Sekretaris,



Dr. Ir. H. MUH. FUAD AZIS D.M., S.T., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19691019 200701 1 018



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411) 3620217
MAKASSAR



SURAT KETERANGAN

Nomor : 230/345 /pol-pp /x /2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MUHAMMAD IQBAL, SH
N i p : 19780325 200901 1 007
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : DICKY PRAYOGO
Nim/ Jurusan : B012191064 / Ilmu Hukum
Lembaga : Universitas Hasanuddin
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Benar telah melaksanakan penelitian pada instansi pemerintah kota makassar Unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, Berkaitan penyusunan Tesis dengan judul "PENEGAKAN HUKUM PEMANFAATAN TATA RUANG TERHADAP KAWASAN PEMUKIMAN DI KECAMATAN PANAKKUKANG MENURUT RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR "

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk digunakan seperlunya .

Makassar, 15 Oktober 2021

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Makassar



MUHAMMAD IQBAL. SH

Pangkat : Pembina (IV/a)

NIP : 19780325 200901 1 007



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN PANAKKUKANG**

Jl. Batua Raya 168, Telp 456054 Makassar

Kode Wilayah : 73.71.09

Makassar, 27 September 2021

Nomor : 070/61/KPNK/IX/2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Bapak Camat Panakkukang
Di
Tempat

Menunjuk surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Nomor : 070/3060-II/BKBP/IX/2021, Tanggal 20 September 2021. Perihal tersebut di atas maka bersama ini di sampaikan kepada saudara bahwa :

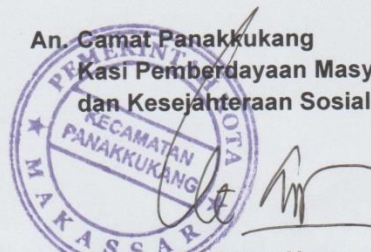
Nama : **DICKY PRAYOGO**
Nim / Jurusan : B012191064 / Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) UNHAS
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar
Judul : **"PENEGAKAN HUKUM PEMANFAATAN TATA RUANG TERHADAP KAWASAN PEMUKIMAN DI KECAMATAN PANAKKUKANG MENURUT RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA"**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi/Wilayah Bapak, sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **23 September s/d 20 Oktober 2021**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat izin Penelitian** ini.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

An. Camat Panakkukang
Kasi Pemberdayaan Masyarakat
dan Kesejahteraan Sosial



Dra. Ee. ST Asma Hamra

Pangkat : Penata TK I

Nip.19651211 199103 2 007

Tembusan:

1. Arsip